

SENIN PON, 23 FEBRUARI 2015
(4 JUMADILAWAL 1948)

TAK INGIN DILECEHKAN NEGARA LAIN Wajar Indonesia Tarik Dubes di Brasil

YOGYA (KR) - Keputusan Pemerintah Indonesia menarik kembali Duta Besar Indonesia di Brasil dinilai sebagai suatu yang wajar. Pemerintah Brasil dianggap telah menghina Indonesia. Hal ini juga menunjukkan Pemerintah Indonesia tidak mau dilecehkan secara hukum oleh negara lain.

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Dr Bambang Cipto MA menyampaikan hal itu kepada *KR* di Yogyakarta, Minggu (22/2). Menurutnya, penarikan dubes sudah sesuai etika diplomasi. Apalagi kedatangan Dubes Indonesia Toto Riyanto ke Brasil atas undangan pemerintah setempat. Namun setibanya di istana presiden untuk menyerahkan dokumen justru ditolak dengan alasan yang tidak jelas.

"Kita tentu tidak ingin dilecehkan di mata internasional ketika akan menegakkan hukum. Penarikan dubes merupakan

hukuman yang setimpal yang memang harus diterima Brasil. Indonesia tidak perlu khawatir terkait keputusan itu. Langkah Brasil tersebut merupakan wujud kekecewaan kepada Indonesia terkait hukuman mati yang akan dijatuhkan pada terpidana kasus narkoba. Saya yakin tidak masalah," katanya.

Bambang yakin, seiring berjalannya waktu hubungan diplomatik kedua negara akan membaik. Saat ini memang masih tegang lantaran Pemerintah Brasil kecewa dengan sistem hukum di Indonesia.

Hal senada diungkapkan Dosen Politik Luar Negeri Indonesia Jurusan Hubungan Internasional (HI)

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Wajar

Universitas Pembangunan Veteran (UPN) Veteran Yogyakarta Ludiro Madu SIP MSi. Menurutnya, Brasil jelas sudah menghina Indonesia. Jauh-jauh hari mengundang dubes, namun ketika sampai di istana presiden justru tidak diperbolehkan masuk. Menarik dubes merupakan langkah yang memang seharusnya diambil Pemerintah Indonesia.

"Memang ada konsekuensi yang akan diterima Indonesia pascakeputusan itu. Namun bagi saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab Indonesia tidak terlalu bergantung terhadap Brasil. Selain itu selama ini hubungan kedua negara ini berbeda ketika kita ada masalah dengan Malaysia, Singapura atau Australia. Terbaru memang Pemerintah Brasil tengah melobi Indonesia agar membeli daging sapi dari sana," jelasnya.

Menurut Ludiro Madu, pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini memang memprioritaskan hubungan bilateral. Namun kebanyakan justru bermasalah. Mulai dari Malaysia dan Australia, sekarang giliran dengan Brasil. Sebelumnya Perdana Menteri Prancis juga memanggil Dubes Indonesia guna menjelaskan mengenai hukuman mati. "Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus menyiapkan langkah-

Sambungan hal 1

langkah kebijakan seandainya ada protes. Ada beberapa hal yang dapat diambil. Seperti menyampaikan nota protes hingga penarikan dubes. Disesuaikan dengan permasalahannya terlebih dahulu," ungkapnya.

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan, seharusnya Pemerintah Brasil menghormati sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia, sehingga tidak sepatutnya Presiden Brasil Dilma Rousseff menunda upacara penyerahan surat mandat Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto. "Saya menyesalkan tindakan Presiden Brasil Dilma Rousseff terhadap Dubes Toto Riyanto," kata Farouk.

Menurutnya, terkait warga negara asing yang telah ditetapkan terfukum mati, secara prosedur dan regulasi tidak ada masalah karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia. "Saya memahami adanya keberatan terkait pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilayangkan oleh negara asal para terfukum," ujarnya.

Namun di sisi lain, tandasnya, seharusnya negara asing juga menghormati dan memahami sistem hukum yang ada di Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat.

(Awh/Sim/Edi)-b



KR-IST

Dilma Rousseff